

Judul Kajian:
**KAJIAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA
UNTUK MENGATASI KEMISKINAN**

Nama Unit Pelaksana :
Direktorat Permukiman dan Perumahan
Email : basah_hernowo@bappenas.go.id

Abstrak

Studi kajian pembangunan ekonomi desa untuk mengatasi kemiskinan ini berkonsentrasi pada desa – desa berdasarkan kriteria tipologi desa, maka desa–desa yang akan menjadi fokus studi adalah desa persawahan , desa perladangan, desa nelayan, desa perkebunan, desa peternakan, serta desa jasa dan perdagangan. Studi ini mengambil sample paling tidak empat propinsi contoh yang akan diseleksi secara sengaja sebagai kerangka wilayah penelitian, yaitu Jawa Barat (Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi), Jawa Tengah (Kabupaten Kendal), Daerah Istimewa Yogyakarta (Kabupaten Bantul), dan Sulawesi Selatan (Kabupaten Pinrang). Di setiap kabupaten contoh akan dipilih satu desa yang sesuai dengan tipologi desa tersebut. Penentuan desa dilakukan secara purposive dengan pertimbangan tingkat kemiskinan dan tipologi desa yang telah ditetapkan.

Data yang digunakan dalam kegiatan studi ini adalah data primer yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dan diskusi terhadap target sasaran, seperti instansi pemerintah, tokoh dan masyarakat, serta data skunder yang memuat kondisi wilayah, kondisi perekonomian wilayah, potensi desa, sosial ekonomi, dan kelembagaan desa.

Dalam kajian ini digunakan dua pendekatan analisis, yaitu analisis kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan tabulasi dan trend analisis, dan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif (metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data) sehingga memberikan yang berguna.

Dari hasil pengumpulan data di lapangan, maka terdapat perbedaan potensi dan ciri dari masing-masing desa contoh. Namun ada ciri yang khas dari masing-masing desa tersebut adalah komoditas yang dihasilkan. Dari kriteria tersebut , dapat diidentifikasi beberapa ciri dari masing-masing tipologi desa, yakni tingkat kemiskinan, struktur mata pencarian, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kepemilikan asset lahan, dan kelembagaan.

Kesimpulan dari kajian ini adalah: (a) tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di desa contoh, sedikit banyak terkait dan dipengaruhi oleh jenis tipologi desa dimana desa tersebut mempunyai sumber mata pencarian tertentu. (b) Sebagian besar desa-desa percontohan, sarana prasarana terpenuhi. (c) dibalik terpenuhinya prasarana dan sarana tersebut masih belum mampu untuk menjadi suatu stimulus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. (d) penguasaan lahan untuk desa-desa yang berlokasi di pulau Jawa umumnya kurang dari 0,5 Ha dan di desa di luar Jawa lebih dari 0,5 Ha.

Dari kesimpulan tersebut dalam kajian ini merekomendasikan: (a) Perlunya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, (b) Adanya penciptaan dan pengembangan lembaga ekonomi yang sudah ada, (c) Mengevaluasi peraturan-peraturan yang selama ini terkait dan berhubungan dengan masyarakat pedesaan, (d) Perlunya inisiatif pemerintah untuk mendorong dan mencari alternative mata pencarian pada masyarakat pedesaan.

Latar Belakang

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Padahal kita ketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berdiam di daerah pedesaan dan berprofesi sebagai petani kecil (lahan terbatas atau sempit). Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desan akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Beberapa program-program pembangunan pedesaan yang pernah dilaksanakan, misalnya program bidang pangan, program Inpres Desa Tertinggal, dan Program Pengembangan Terpadu Antar Desa (PPTAD) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengembangkan pedesaan dalam mengejar ketertinggalannya dari perkotaan. Guna mendorong peningkatan pangan, program-program pembangunan yang pernah dilaksanakan adalah KOGM (Komando Gerakan Makmur), Bimas (Bimbingan Massal, Innas (Intensifikasi Massal), Insus (Intensifikasi Khusus), dan Supra Insus. Selain itu guna menyokong program pangan, pemerintah menyediakan bantuan Kredit Usaha Tani (KUT) bagi para petani dalam memberikan permodalan dalam pengelolaan lahannya.

Akan tetapi program-program tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani karena harga beras lokal masih relative lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras impor. Sedangkan dana penGembalian LUT sampai saat ini banyak yang menunggak karena petani tidak mampu membayar cicilan tersebut. Adapun program IDT dan PPTAD lebih cenderung pada pembangunan fisik saja sehingga penekanan terhadap pembangunan masyarakat umum kurang tersentuh. Padahal berbagai persoalan yang membutuhkan penanganan pembangunan masyarakat desa sesungguhnya sangat mendesak, seperti ketertinggalan desa dari kota hampir di segala bidang, tidak terakomodasinya keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam program-program pemerintah, dan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masih rendah.

Berdasarkan pengalaman tersebut sudah seharusnya pendekatan pembangunan pedesaan mulai diarahkan secara integral dengan mempertimbangkan kekhasan daerah baik dilihat dari sisi kondisi, potensi dan prospek dari masing-masing daerah. Namun di dalam penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan secara umum dapat dilihat dalam tiga kelompok (Haeruman, 1997), yaitu :

1. Kebijakan secara tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung (pasar, pendidikan, kesehatan, jalan, dan lain sebagainya), penguatan kelembagaan, dan perlindungan terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat melalui undang-undang.
2. Kebijakan yang langsung diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan.

3. Kebijakan khusus menjangkau masyarakat melalui upaya khusus, seperti penjaminan hukum melalui perundang-undangan dan penjaminan terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Di samping itu kebijakan pembangunan pedesaan harus dilaksanakan melalui pendekatan sektoral dan regional. Pendekatan sektoral dalam perencanaan selalu dimulai dengan pernyataan yang mengkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih menitik beratkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Di dalam kenyataan, pendekatan regional sering diambil tidak dalam kerangka totalitas, melainkan hanya untuk beberapa daerah tertentu, seperti daerah terbelakang, daerah perbatasan, atau daerah yang diharapkan mempunyai posisi strategis dalam arti ekonomi-politis. Oleh karena arah yang dituju adalah gabungan antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan daerah perlu selalu dikaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial.

Undang-undang Penata Ruangan (UUPR) tahun 1992 menyebutkan bahwa penataan ruang kawasan pedesaan diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah nasional atau wilayah propinsi dan kabupaten atau kota. Penataan kawasan pedesaan harus disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada dikawasan yang bersangkutan. Kawasan pedesaan merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama di sektor pertanian, termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa membangun pertanian pada hakekatnya adalah membangun perekonomian desa itu sendiri.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pertanian yang ada ddi desa sangat beragam. Karakteristik kegiatan perekonomian pada suatu kawasan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi tiga sektor pertumbuhan (Soedrajat, 1997), yaitu (1) *sektor pertumbuhan primer*, yakni sektor atau kegiatan ekonomi yang menciptakan pertumbuhan pesat dan menciptakan kekuatan ekspansi ke berbagai sektor lain dalam perekonomian , (2) *sektor pertumbuhan suplementer*, yakni sektor yang berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari perkembangan di sektor pertumbuhan primer, dan (3) *sektor pertumbuhan terkait*, yakni sektor atau ekonomu yang berkembang seirama dengan kenaikan pendapatan, penduduk dan produksi sektor industri.

Biro Pusat Statistik (1990) mengklasifikasikan sektor perekonomian ke dalam dua kriteria, yaitu asas kesatuan komoditi dan kesatuan kegiatan prinsip utama pengklasifikasian ini adalah keragaman (homogenitas) dari tiap sektor, sehingga barang dan jasa atau kegiatan perekonomian yang tercakup dalam satu sektor harus memiliki sifat yang relative homogen. Oleh karena itu, pengklasifikasian 19 sektor khususnya untuk sektor pertanian, dibagi ke dalam enam sub sektor pertanian, yaitu padi atau persawahan, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dapat dijadikan dasar keagamaan kegiatan pertanian di pedesaan.

Adapun Mubiyarto (1994) membagi tipologi desa tertinggal di Propinsi Jawa Tengah ke dalam sembilan tipologi berdasarkan komoditas basis pertanian dan kegiatan mayoritas petani pada desa tersebut. Kesembilan karakteristik desa adalah desa persawahan, desa lahan kering, desa perkebunan, desa peternakan, desa nelayan, desa

hutan, desa industri kecil, desa buruh industri, serta desa jasa dan perdagangan. Sedangkan Soedrajad (1997) membagi tipologi ke dalam 4 kategori, yaitu :

- a. Desa pantai adalah desa yang kegiatan utamanya alam penangkapan ikan.
- b. Desa persawahan adalah desa yang mayoritas penggunaan lahan untuk persawahan terutama tergantung pada produktivitas penanaman padi.
- c. Desa perkebunan adalah desa yang mayoritas penggunaan lahanya untuk perkebunan.
- d. Desa perladangan adalah desa yang kegiatan utamanya adalah perladangan (menanam tanaman pangan tadah hujan dan palawija).

Sedangkan berdasarkan kriteria Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), tipologi desa dibagi ke dalam enam tipologi berdasarkan kegiatan ekonominya, yaitu desa industri, desa pertanian tanaman pangan, desa perkebunan, desa perikanan, desa pariwisata atau jasa dan desa peternakan.

Berdasarkan paparan di atas jelas bahwa belum ada keseragaman dalam penentuan tipologi desa. Namun terdapat kesamaan pandangan dalam penentuan tipologi desa yaitu didasarkan pada kegiatan perekonomian yang utama dari desa tersebut. Dengan mengetahui komponen utama dari aktivitas ekonomi suatu desa, maka kebijakan dan perencanaan pembangunan desa dapat disesuaikan dengan tipologi desa tersebut. Pembangunan desa yang terfokus pada kegiatan ekonomi desa tersebut, diharapkan dapat memberikan multiplier efek yang luas, seperti perluasan lapangan kerja, investasi, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Selain itu diharapkan terjadinya keterkaitan ke belakang dan ke depan (backward dan forward linkages) baik antar desa maupun antar desa dengan kota. Lebih lanjut diharapkan adanya perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat desa tersebut dan sekaligus dapat mengatasi kemiskinan yang ada di desa.

Tujuan Studi

Tujuan dari kajian ini adalah:

1. Mendapatkan data awal kondisi sosial ekonomi.
2. Mengidentifikasi sector unggulan yang berperan dalam perekonomian pedesaan
3. Menelusuri aspek-aspek yang mempengaruhi pengembangan sektor unggulan tersebut.

Ruang Lingkup studi

Kajian Pembangunan Ekonomi Desa untuk Mengatasi Kemiskinan dilakukan melalui pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif untuk menangkap gambaran umum mengenai kondisi sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat dari lokasi penelitian. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap data yang diperoleh di lokasi penelitian untuk dapat menghasilkan beberapa rekomendasi terhadap pembangunan ekonomi desa dalam mengatasi kemiskinan.

Permasalahan

Dalam mewujudkan sarana pembangunan pedesaan, banyak kendala yang akan dihadapi, yaitu masalah pengangguran, kemiskinan, kesenjangan, konflik social dan lain sebagainya. Masalah kemiskinan menyebabkan ketimpangan baik antar golongan penduduk, antar sector kegiatan ekonomi maupun antar daerah. Dalam lingkup yang lebih luas, masalah kemiskinan dan kesenjangan akan memicu kecemburuan sosial, dan pada akhirnya mengganggu kelangsungan pembangunan

Kerangka Teoritis

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Menurut Haeruman (1997), ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

- 1) Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
- 2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Adapun sasaran pokok pembangunan pedesaan adalah terciptanya kondisi ekonomi rakyat di pedesaan yang kukuh, dan mampu tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan. Sasaran pembangunan pedesaan tersebut diupayakan secara bertahap dengan langkah: *pertama*, peningkatan kualitas tenaga kerja di pedesaan; *kedua*, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah desa; *ketiga*, penguatan lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat desa; *keempat*, pengembangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa; *kelima*, pengembangan sarana dan prasarana pedesaan; dan *keenam*, pemantapan keterpaduan pembangunan desa berwawasan lingkungan.

Hasil pengumpulan Data

1. Desa Kalibuaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang.

Desa Kalibuaya memiliki wilayah yang strategis dengan adanya jalan yang dapat mengakses dengan mudah ke kecamatan lain, ke Ibukota Kabupaten (Kota Karawang) dan ke Ibukota Negara (Jakarta). Sebagian besar desa Kalibuaya merupakan areal persawahan yang mencapai 90% luas desa atau seluas 4,48 Km². Areal persawahan tersebut sebagian besar diusahakan atau dikerjakan oleh penduduk setempat, sehingga penduduk Desa Kalibuaya merupakan masyarakat petani.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menjadi gudang beras nasional. Oleh karena itu sangat wajar beberapa desa di kabupaten ini merupakan penghasil beras. Adapun nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karawang adalah sebesar Rp. 2.627,8 milyar pada tahun 2000. Sumbangan terbesar untuk PDRB Kabupaten Karawang berasal dari sector industri pengolahan yang sebesar 32,8%. Sumbangan terbesar bagi sector pertanian diberikan oleh subsector tanaman pangan, khususnya padi karena didukung oleh luas lahan yang digarap mencapai

seratus ribu hektar lebih, dan merupakan areal terluas ke dua setelah Kabupaten Indramayu.

Adapun yang bekerja sebagai pengrajin di Desa Kalibuaya umumnya memproduksi keperluan alat – alat rumah tangga yang terbuat dari kayu, bambu dan bahan lainnya yang tersedia di wilayah desa dan sekitarnya. Hasil produksi home industri tersebut dijual ke luar desa atau luar kecamatan, sehingga produk tersebut memiliki nilai tambah bagi pendapatan Desa Kalibuaya.

Pada usaha pertanian tanpa melakukan diversifikasi usaha, sehingga pendapatan ekonomi rumah tangga sangat tergantung kepada hasil produksi padinya. Hal ini akan berakibat fatal apabila terjadi kegagalan produksi (panen), yang secara langsung akan menurunkan pendapatan ekonomi keluarga. Hanya sebagian golongan kecil petani yang melakukan diversifikasi usaha rumah tangganya selain bertani, yaitu dengan menjadi pengrajin atau pedagang di desanya, sehingga apabila terjadi kegagalan panen, golongan ini relative “aman“ dengan pendapatan cadangan (reserve income) yang dimiliki dari diversifikasi usahanya.

Dilihat dari faktor pendukung berupa kondisi jalan, jalan utama di Desa Kalibuaya merupakan jalan kabupaten dengan kondisi jalan beraspal baik dan termasuk jalan golongan IV, sedangkan jalan desa beraspal dengan kondisi baik. Kondisi jalan tersebut sangat mendukung kelancaran pengangkutan sarana produksi dan hasil produksi desa, begitu pula dengan sarana transportasi. Faktor pendukung fisik lainnya, berupa sarana komunikasi yang tersedia, relative mudah untuk diakses dengan adanya jaringan telepon yang menyebar di wilayah desa. Jaringan listrik PLN telah menyebar ke seluruh desa dan sebagian besar rumah penduduk telah menggunakannya. Sarana media massa cetak, berupa surat kabar dan majalah yang beredar di Desa Kalibuaya, ketersediaannya sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh permintaan masyarakat akan media cetak tersebut masih rendah.

Sedangkan infrastruktur ekonomi, seperti pasar dan perbankan tidak terdapat di Desa Kalibuaya. Namun penduduk dapat mengakses ke dua lembaga ekonomi tersebut di ibukota kecamatan. Karena mudahnya sarana transportasi dari dan ke Desa Kalibuaya, untuk sarana fisik bagi pendidikan ada terdiri dari dua unit Sekolah Dasar (SD). Sedangkan SLTP dan SLTA berada di ibukota kecamatan Telagasari. Sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa Kalibuaya berupa Puskesmas dan Balai Pengobatan Umum, relative udah dan murah. Saluran irigasi teknis untuk areal persawahan yang terdapat di desa Kalibuaya, sangat mendukung usaha pertanian masyarakatnya, dapat mengairi sawah milik petani sebanyak dua kali dalam setahun, sehingga memberikan kesempatan kepada petani untuk melakukan penanaman padi sebanyak dua kali dalam satu masa tanam (satu tahun). Pengairan areal sawah dilakukan secara bergilir sesuai jadwal yang ditentukan oleh pihak pemerintah kabupaten.

Dukungan Pemerintah Daerah Karawang bagi masyarakat Desa Kalibuaya, umumnya dilaksanakan pemeliharaan dan penyediaan sarana dan prasarana fisik public, seperti pemeliharaan jalan, pemeliharaan saluran irigasi, penambahan saluran telepon, penambahan sarana pelayanan kesehatan beserta tenaga medisnya. Selain dukungan secara fisik, pemerintah daerah setempat saat ini memberikan pula dukungan non fisik, seperti pemberian kredit pertanian (Kredit Ketahanan Pangan) pada para petani, yang dimuali pada awal tahun 2000.

Status dan luas kepemilikan sawah menjadi dasar bagi penggolongan tingkat ekonomi, kondisi ekonomi petaniannya, karena hal ini erat kaitannya dengan kemampuan petani dalam pengolahan sawahnya. sebagian besar petani adalah petani dengan luasan dibawah kepemilikan 0,5 Ha dan sebagian lagi adalah petani penggarap. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk termasuk golongan miskin pedesaan, dan sebagian kecil saja yang termasuk golongan ekonomi mampu.

Pada saat ini terdapat Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dianggap sebagai pengganti LKMD pada masa lalu. Lembaga ekonomi terutama lembaga keuangan yang ada adalah koperasi Unit desa (KUD), namun kegiatan dan keberadaanya hingga saat ini relative tidak berperan bagi masyarakat. Dalam usaha untuk mengembangkan potensi masyarakat desa, diperlukan bantuan teknis dan financial yang relati lebih longgar dan luwes dalam prosedur mendapatkannya, sehingga petani memiliki kesempatan luas untuk mengembangkan usahanya.

2. Desa Sipatuo , Kecamatan Patampua , Kabupaten Pinrang

Desa Sipatuo ini mempunyai wilayah sebesar 63,39 km² dengan jumlah jiwa sebanyak 2.628 jiwa pada tahun 2001 sehingga kepadatan penduduknya adalah 41 jiwa/km², dan lokasinya berjarak sekitar 3 km dari ibukota kecamatan sedangkan ke ibukota kabupaten sekitar 18 km.

Potensi desa yang dihitung berdasarkan keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau yang digunakan oleh desa baik sumber daya alam, penduduk, kelembagaan, dan sarana/prasarana, maka desa ini termasuk dalam kategori sedang, sedangkan apabila ditinjau dari segi potensi pengembangan, maka desa ini mempunyai prospek dalam potensi pengembangan pekerbunan khususnya perkebunan rakyat kakao.

Sebagian besar penduduk desa Sipatuo bermata pencaharian dalam sector pertanian (95%) khususnya sawah dan berkebunan kakao, hal ini didukung dengan sebagian besar wilayah desa ini adalah perkebunan dan persawahan. Sedangkan sisanya bermatapencaharian sebagai PNS (1%), Pedangan (1%), penyedia jasa angkutan (2%) dan 1% untuk aktivitas lainnya (pengrajin, buruh tani).

Ditinjau dari faktor pendukung wilayahnya, pada prasarana jalan, Kabupaten Pinrang mempunyai jalan sepanjang 781,97 km dan sepanjang 149,36 km atau sekitar 19,10 % dalam kondisi rusak dan rusak berat, sedangkan jalan desa yang melintasi desa ini yang menghubungkan dengan Desa Malimpung sepanjang kurang lebih 2 km kondisinya beraspal dan relative baik, namun untuk jalan yang menghubungkan antar dusun masih jalan tanah dan batu. Sedangkan jalan-jalan yang menghubungkan rumah mereka dengan kebunnya kondisinya masih jalan tanah dan bila hujan, jalan tersebut hanya dapat dijangkau dengan jalan kaki. Kondisi ini dapat mempengaruhi aliran input produksi dan hasil perkebunan dan pertanian dari penduduk tersebut.

Pada sarana perhubungan, sebagai alat transportasi desa ini adalah ojek, angkutan desa dan pick up yang banyak mereka gunakan untuk berbagai aktivitas termasuk untuk menjual hasil pertanian dan perkebunan.

Pada Infrastruktur ekonomi, faktor ini dapat menunjang perkembangan perkebunan rakyat, namun di desa ini tidak memiliki fasilitas ekonomi yang dapat menunjang perekonomian desa seperti pasar dan lembaga keuangan, namun penduduk desa dapat memanfaatkan ke dua lembaga ekonomi tersebut di Kelurahan Benteng.

Pada Sarana Komunikasi, berdasarkan pengamatan di lapangan saluran telepon di desa ini belum ada, namun masyarakat di desa ini sering memanfaatkan wartel (Warung Telekomunikasi) sebagai alat komunikasi yang berada di luar Desa Sipatuo yaitu Kelurahan Benteng.

Ditinjau dari dukungan Pemerintah Daerah, Pemda Kabupaten Pinrang mengalokasikan anggaran pembangunan untuk sub sector pekerbunana sebesar Rp. 874,04 juta atau 1,41 % dari total APBD sebesar Rp. 76,84 Milyar.(BPS Kabupaten Pinrang, 1999 dan 2000), sedangkan untuk TA 2002, alokasi dana yang diberikan untuk pengembangan perkebunan sebesar Rp. 107 juta atau 0,064% dari total APBD sebesar Rp. 165,61 Milyar, sehingga terjadi penurunan anggaran untuk kegiatan perkebunan untuk TA 2002 dibandingkan TA 2000.

Untuk mendukung kegiatan perkebunan, sub dinas perkebunan dibantu 2 kantor Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) dan 1 Kantor Unit Pelayanan Pengembangan Teknis (UPPT), selain dukungan dari pemerintah, pihak pengusaha industri kakao yang tergabung dalam ASKINDO (Asosiasi Kakao Indonesia) juga memberikan bantuan dana untuk meningkatkan kualitas dari petani kakao.

Kondisi sosial masyarakat desa Sipatuo adalah desa yang mempunyai tingkat kemiskinan yang paling tinggi, dari jumlah penduduk sebanyak 2.628 jiwa atau 561 KK terdapat 232 KK atau 41,36 % merupakan kepala keluarga yang tergolong miskin., dari sisi pendidikan adalah 70% berpendidikan SD ke bawah, masyarakat desa Sipatuo kebanyakan berasal dari Suku Bugis, salah satu ciri khas yang dapat ditemui pada masyarakat yang mencerminkan status social di antara mereka adalah nama mereka. Bila diberi awalan Andi atau Puan maka mereka keturunan bangsawan sedangkan bila tidak diberi awalan tersebut berarti masyarakat biasa.

Kondisi ekonomi, dari sisi penguasaan asset lahan, petani yang memiliki dan menggarap lahan perkebunannya sendiri ada sebanyak 89,63 % dan sisanya sebagai petani penggarap. Sedangkan petani yang memiliki dan menggarap lahan sawahnya sendiri ada sebanyak 79,35 % sedangkan sisanya sebagai petani penggarap. Kisaran lahan perkebunan yang mereka miliki dan digarap oleh mereka sendiri antara 0,2-0,8 ha per kepala keluarga, sedangkan lahan sawah yang mereka miliki dan digarap sendiri antara 0,6-1,6 ha per kepala keluarga.

Dari sisi produktivitas dari kedua komoditas perkebunan kakao dan sawah, maka rata-rata kakao kering yang dihasilkan adalah 466 kg/ha/tahun sedangkan padi yang dihasilkan rata-rata per hektar per musim adalah 6-7 ton/ha.

Dari sisi kelembagaan, kelembagaan yang berkembang di desa Sipatuo adalah kelompok tani dan koperasi, namun perkembangan dari kelompok ini tidak bagus dan cenderung pasif. Peran Lembaga Masyarakat Desa (LMD) tidak begitu jelas terlihat namun yang berperan lebih kuat adalah kepala desa dan tokoh masyarakat.

3. Desa Kertawangi , Kecamatan Cisarua , Kabupaten Bandung.

Desa ini mempunyai luas sepertiga dari luas Kecamatan Cisarua, yaitu 13,61 km² sedangkan jumlah penduduk yang mendiami desa tersebut adalah sebanyak 8.807 jiwa pada tahun 2001. Sehingga kepadatannya adalah sebesar 648 jiwa/km².

Topografi desa ini adalah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata diatas 1.200 meter dari permukaan bumi.

Rata-rata penduduk desa tersebut selain mengelola sawah dan kebun juga memelihara sapi perah antara 2-5 ekor.

Dari dukungan Sektor ekonomi terhadap wilayah , terdiri atas kontribusi sector ekonomi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto),factor pendukung wilayah dan factor dukungan pemerintah daerah.

Pada kontribusi sector ekonomi terhadap PDRB, sector pertanian memberikan kontribusi sebesar 10,1 % terhadap PDRB Kabupaten Bandung, sector industri pengolahan sebesar 50,5 % dan kemudian sector perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,8 %, namun bila dilihat dari pertumbuhan rata-rata, hamper seluruh sector mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Hampir seluruh sector perekonomian terpuruk akibat melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar.

Dilihat dari potensi pertanian, Kabupaten Bandung relative masih cukup berpotensi untuk terus dikembangkan. Salah satu subsektor pertanian yang berpotensi untuk terus dikembangkan adalah peternakan khususnya peternakan sapi perah, dimana kabupaten ini memiliki jumlah sapi perah terbanyak di Jawa Barat yakni mencapai 52,27 % dari total populasi sapi perah.

Sebagaimana disebutkan diatas, desa Kertawangi merupakan salah satu desa yang telah lama bermata pencaharian dari pertanian dan peternakan sapi perah. Adapun prosentase penduduk yang bekerja sebagai petani adalah sebanyak 78 %, sebagai pedagang 12 %,sebagai pekerja industri 2 %, penyedia jasa angkutan 5 %, dan lain-lain(PNS, pengrajin) sebanyak 3 %.

Faktor pendukung wilayah, **prasarana jalan** relative baik dan beraspal sepanjang 3 km ke kota Cimahi, namun sebagian jalan di permukiman-permukiman masih jalan batu dan tanah, sedangkan tempat penampungan susu dari peternak berada di dekat kantor desa sehingga para peternak harus berjalan jauh guna mengantar susunya ke tempat penampungan susu tersebut, **sarana perhubungan** yang sering digunakan adalah angkutan perdesaan, pick up dan ojek. Infrastruktur ekonomi yaitu lembaga keuangan dan fasilitas pasar tidak terdapat di desa Kertawangi, namun peternak lebih sering mengandalkan koperasi susu untuk meminjam modal atau mengambil pembayaran hasil penjualan produksi susunya, **sarana komunikasi** telah masuk ke desa tersebut namun tidak seluruh sambungan telepon dapat memasuki permukiman penduduk karena kondisi daerah yang topografinya berbukit dan belum banyak penduduk yang berkeinginan untuk memasang telepon, **infrastruktur pendukung lainnya** seperti air dan jaringan listrik telah tersedia semua.

Faktor dukungan dari Pemerintah Daerah yaitu dinas peternakan Kabupaten Bandung bekerjasama dengan koperasi susu sarwamukti sering mengadakan penyuluhan mengenai peningkatan kualitas susu dari petani juga penyediaan Balai inseminasi dari departemen pertanian yang menyediakan semen beku bagi peternak sapi perah yang bekerjasama dengan koperasi sarwamukti.

Kondisi social masyarakatnya relative homogen dimana kebanyakan sebagai petani dan kesenjangan diantara golongan ekonomi lemah dan mampu tidak begitu menonjol di desa tersebut, dilihat dari sisi tingkat pendidikan, rata-rata kepala keluarga petani di desa tersebut adalah 42 % lulusan SD dan tidak tamat SD, 38 % menamatkan sampai sekolah menengah pertama dan 16 % menamatkan sekolah menengah atas,

sedangkan 4 % menamatkan pendidikannya sampai dengan setingkat akademi dan universitas.

Kondisi ekonomi, pendapatan petani dari peternakan sapi adalah rata-rata Rp. 825 ribu per bulan dan pendapatan petani dari hasil pertanian terutama sayuran dan padi rata-rata Rp. 292 ribu per bulan, dengan demikian pendapatn petani dari peternakan sapi perah dan hasil pertanian adalah Rp. 1,117 juta per bulan.

Kelembagaan ekonomi yang cukup menonjol di desa tersebut adalah Koperasi sarwamukti, dimana koperasi ini sangat berperan besar dalam penampungan produk susu dari petani, bahkan koperasi ini sering dijadikan oleh wakil para peternak untuk melakukan negosiasi dengan pihak industri pengolahan sapi, namun dilain sisi peran Lembaga Masyarakat Desa (LMD) relative kecil karena yang lebih berperan adalah kepala desa, tokoh masyarakat, pemuka masyarakat dan pihak koperasi dan biasanya para tokoh masyarakat tersebut tidak pernah membawa nama lembaga dalam rapat-rapat desa.

4. Desa Sukasirna , Kecamatan Cibadak , Kabupaten Sukabumi

Jumlah penduduk yang mendiami desa tersebut adalah sebanyak 8.435 jiwa atau 1.965 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut 1.226 kepala keluarga tergolong keluarga miskin (62,39%), dan desa tersebut terbadai atas 3 dusun, 13 Rukun Warga dan 38 Rukun tetangga.

Dari dukungan Sektor ekonomi terhadap wilayah, terdiri atas kontribusi sector ekonomi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), factor pendukung wilayah dan factor dukungan pemerintah daerah.

Pada kontribusi sector ekonomi terhadap PDRB, sector pertanian memberikan kontribusi sebesar 36,5 % terhadap PDRB Kabupaten Sukabumi disusul, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran. Adapun kontribusi pada sektor pertanian adalah 22,5 % subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan (5,6 %) dan subsektor peternakan (5,4 %). namun bila dilihat dari pertumbuhan rata-rata, hamper seluruh sektor mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya adalah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Hampir seluruh sektor perekonomian terpuruk akibat melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar.

Jika ditinjau dari sisi matapencaharian masyarakat Desa Sukasirna adalah 58 % bergerak dalam sektor pertanian, satu persen dalam sektor pertambangan, 2,9 % dalam bidang industri, 3,6% dalam sektor pembangunan, 16,9 % bergerak dalam sektor perdagangan, 4,5 % bergerak dalam sektor angkutan dan 12,2 % bergerak dalam sektor jasa-jasa. Dengan demikian dapat dikatakan lebih dari setengah penduduk desa tersebut berprofesi sebagai petani.

Faktor pendukung wilayah, **prasarana jalan** relative baik dan beraspal sepanjang 3 km ke kota kecamatan, sedangkan jalan menuju permukiman-permukiman masih berupa jalan tanah, **sarana perhubungan** yang ada di desa tersebut adalah angkutan perdesaan dan ojek yang sanagt berperan penting sebagai alat transportasi, **infrastruktur ekonomi** berupa lembaga keuangan dan pasar di desa tersebut tidak ada, akan tetapi penduduknya lebih sering ke ibu kota kecamatan karena jaraknya yang tidak terlampau jauh dari desa tersebut, **sarana komunikasi** telah masuk didesa tersebut walaupun baru sedikit yang mempunyai telepon dan untuk keperluan komunikasi lebih banyak memanfaatkan warung telekomunikasi yang ada didesa tersebut, **infrastruktur**

pendukung lainnya yaitu fasilitas air minum dan jaringan listrik telah memasuki seluruh permukiman, namun untuk kebutuhan air minum diperoleh dari mata air.

Faktor dukungan dari pemerintah daerah yaitu adanya penyuluhan yang dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan yang melakukan pembinaan pada petani-petani lading selain itu juga pemerintah memberikan program fasilitasi pembentukan kelompok tani khususnya untuk kelompok tani palawija khususnya untuk ubi kayu dan jagung pada lahan kering, selain dukungan pemerintah, pihak PTPN VIII selaku perusahaan BUMN memberikan bantuan berupa penyewaan lahan yang tidak terpakai untuk perkebunan.

Kondisi sosial masyarakat desa tersebut tergolong salah satu desa yang banyak kepala keluarganya miskin (sebesar 62,39 %) di Kecamatan Cibadak, dari tingkat pendidikan untuk kepala keluarga tergolong rendah yaitu 65,79 % berpendidikan SD dan tidak sekolah, 33,33 % berpendidikan sekolah menengah dan sisanya berpendidikan setingkat akademi.

Kondisi ekonomi, sebagian besar petani di desa tersebut hanya memiliki kurang dari 0,5 ha, selain itu mereka juga menyewa lahan-lahan kering dari PTPN VIII rata-rata seluas 1472 m² dengan harga Rp. 5000/tahun/400 m² dengan lama sewa lahan untuk masing-masing kepala keluarga adalah selama 3 tahun. Rata-rata penerimaan petani dari beberapa sumber pendapatan dalam satu bulannya adalah sebesar Rp. 320.000.

Kelembagaan, sebagaimana disebutkan diatas bahwa infrastruktur perekonomian seperti bank dan pasar tidak terdapat di desa tersebut, begitu juga koperasi. Seangkan Badan Perwakilan Desa sebagai pengganti Lembaga Masyarakat Desa keberadaannya belum dapat dirasakan oleh masyarakat dan selam ini yang cukup berperan adalah kepala desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

5. Desa Gempolsewu , Kecamatan Rowosari , Kabupaten Kendal.

Desa Gempolsewu berada di Kecamatan Rowosari yang berjarak ± 55 km arah barat dari kota Semarang, dan berbatasan langsung dengan laut jawa di sebelah utara, pada desa ini mempunyai Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Tawang, yang merupakan Pelabuhan Perikanan bertipe C atau pelabuhan perikanan yang dipunyai daerah tingkat II.

Dengan keberadaan PPI Tawang di desa tersebut, maka menjadikan sebagian besar penduduknya berusaha dibidang perikanan atau sebagai nelayan dengan komposisi 4.083 orang (68,78%), buruh tani 722 orang (12.16%), buruh industri dan bangunan 482 orang (8.12 %), petani 441 orang (7.43 %), dan sebagai pengusaha 210 orang (3.54 %).

Jika terjadi hujan, maka desa tersebut tidak pernah terlepas dari banjir, yang disebabkan oleh karena genangan luapan air dari sungai Kalikuto yang mencapai ketinggian ± 1 meter.

Dari dukungan Sektor ekonomi terhadap wilayah , terdiri atas kontribusi sector ekonomi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto),factor pendukung wilayah dan factor dukungan pemerintah daerah.

Pada kontribusi sector ekonomi terhadap PDRB, sector industri pengolahan memberikan kontribusi relative share yang tinggi dibandingkan sector lain yaitu sebesar 42.58 % terhadap PDRB Kabupaten Kendal disusul, sector pertanian rata-rata 24.7 % dengan sub sektor bahan makanan, perkebunana, peternakan, kehutanan dan pertanian, namun untuk subsektor perikanan hanya memberikan kontribusi 1, 99 % pada tahun 1999, padahal subsektor ini menyimpan potensi yang sangat besar mengingat keberadaan fasilitas Pusat Pendaratan Ikan.

Faktor pendukung wilayah, untuk **infrastruktur sarana dan prasarana** perikanan dari segi kepemilikannya sebagian besar berusaha dengan menggunakan motor tempel, padahal apabila digunakan untuk menangkap ikan di perairan hanya akan mempunyai jangkauan yang terbatas, sedangkan untuk unit-unit penangkapan ikan mempunyai fishing base namun berukuran relative kecil sehingga hanya memungkinkan beroperasi di wilayah perairan pantai dengan waktu melaut hanya satu hari, pada **infrastruktur pertanian** yang mendukung usaha tani masyarakat desa tersebut adalah adanya saluran irigasi teknis bagi areal pesawahan seluas 88.44 hektar (18.69 %), pada **infrastruktur pendidikan dan kesehatan** yaitu terdapatnya 6 unit SD swasta dan 1 unit SLTP swasta namun tidak mempunyai SLTA, disamping itu untuk tingkat pendidikan desa Gempolsewu sebagian besar tamat SMP yaitu sebanyak 3.946 penduduk (40.71 %) sedangkan untuk tamatan SD sebanyak 2.801 penduduk (28.89 %) dan SLTA sebanyak 631 penduduk (6.51%)

Faktor dukungan dari pemerintah daerah sangat kurang sekali, hal ini dapat dilihat sampai dengan saat ini belum adanya program-program yang memberdayakan masyarakat nelayan yang bergerak dibidang perikanan, berbeda dengan bidang pertanian yaitu adanya Bimas, Inmas, Insus, KUT dan lain-lain, program yang hadir hanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan terakhir adanya program Protekan (Program peningkatan Ekspor Perikanan) pada tahun 2003.

Kondisi social masyarakat desa Gempolsewu yang tergolong prasejahtera sangat mendominasi yaitu sebanyak 1.395 keluarga atau 52.60 % kemudian keluarga sejahtera II/III sebanyak 907 keluarga atau 34.20 % dan keluarga sejahtera I sebanyak 350 keluarga atau 13.20 %, sedangkan dari sisi kepemilikan rumahnya sebagian besar tergolong tidak permanent atau masih dalam bentuk papan yaitu sebanyak 1.396 rumah atau 55.86 %, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Gempolsewu tidak mampu membeli rumah yang permanent dan semi permanent dengan demikian tergolong miskin.

Kelembagaan, satu-satunya lembaga dan fasilitas yang dimiliki nelayan desa Gempolsewu adalah adanya Tempat pelelangan Ikan (TPI) Tawang, dan untuk setiap nelayan yang masuk de desa tersebut diwajibkan menjual hasil tangkapannya di TPI Tawang.

6. Desa Bangunjiwo , Kecamatan Kasihan , Kabupaten Bantul.

Desa Bangunjiwo memiliki luas wilayah 15.43 km², dengan jumlah penduduk sebesar 19.185 jiwa sehingga kepadatan penduduknya sebesar 1.243 penduduk/km². Luas wilayah tersebut sebesar 1.077,78 hektar (66.80 %)diperuntukan bagi permukiman dan perumahan penduduk sedangkan sisanya untuk sawah sebesar 322 hektar (19.96 %) dan untuk jalan sebesar 95.84 hektar (5.94 %), sedangkan dari sisi mata pencahariannya, maka 88,29 % merupakan perajin gerabah dan keramik sedangkan mata pencaharian yang lain prosentasenya tidak mencapai 10 %, hal ini terjadi karena tanah yang ada di desa tersebut sangat mendukung terhadap usaha pembuata gerabah dan keramik.

Dari dukungan Sektor ekonomi terhadap wilayah , terdiri atas kontribusi sector ekonomi terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto),factor pendukung wilayah dan factor dukungan pemerintah daerah.

Pada kontribusi sector ekonomi terhadap PDRB, sector pertanian masih mempunyai kontribusi yang paling besar terhadap kegiatan perekonomian Kabupaten Bantul yaitu 24 % terhadap PDRB setiap tahunnya bahan pada tahun 1999 kontribusinya

mengalami peningkatan sebesar 29.22 %, kemudian sektor industri pengolahan 17.53 % dan sektor perdagangan sebesar 15.41 %.

Faktor pendukung wilayah, **potensi dukuh kasongan sebagai desa wisata** yaitu suatu bentuk desa atau kawasan yang dikembangkan sebagai suatu obyek wisata atau daerah tujuan wisata dengan memanfaatkan potensi keberadaan pusat/sentra industri lokal sebagai daya tarik utama yang akan ditawarkan kepada wisatawan. Besarnya jumlah unit usaha kerajinan yang ada di desa tersebut dengan lokasi kegiatan meliputi beberapa dusun sehingga membentuk suatu kawasan sentra industri kerajinan gerabah atau keramik, **sarana perumahan** bagi penduduk desa tersebut 83.7 % atau sekitar 3.803 unit merupakan rumah permanent, hal ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat desa Bangunjiwo dilihat dari sisi perumahannya berada pada kondisi mampu dan sudah berada diatas garis kemiskinan, **prasarana pendidikan dan kesehatan** di desa Bangunjiwo adalah 10 unit TK, 11 unit SD, 2 unit SLTP dan 1 unit SLB, adapun apabila dilihat dari sisi tingkat pendidikannya, penduduk desa Bangunjiwo sebagian besar taman SLTP dan SLTA yaitu 44,8 % dan 22, 2 %, **sarana angkutan, perhubungan dan jalan** prosentase terbesar adalah sepeda sebagai alat transportasinya yaitu sejumlah 3.998 atau 64.77 %, sedangkan alat komunikasi seperti Kantor pos dan saluran telepon sebagai sarana perhubungan juga telah memasuki wilayah desa Bangunjiwo.

Faktor dukungan pemerintah setempat, yaitu telah berperan sejak tahun 1979 dengan didirikannya UPT (Unit Pelaksana Teknis) sebagai kepanjangan tangan dari Departemen Perindustrian dalam pembinaan pengembangan industri kecil.

Kondisi social masyarakat terlihat cukup mapan, sehingga prosentase keluarga miskinnya relative kecil.

Kondisi ekonomi, telah dikemukakan diatas bahwa prosentase penduduk yang bekerja dibidang pertanian mencapai 39.84 %, akan tetapi di desa Bangunjiwo jumlah penduduk yang berprofesi sebagai pengrajin mencapai 88,3 %, penghasilan yang diperoleh pemilih gerabah dari penjualannya berkisar antara Rp. 1,5 juta sampai Rp. 10 juta/bulan atau rata-rata per bulan laba bersih sebesar Rp. 3,35 juta. Beberapa pemilih gerabah yang sudah maju biasanya mempekerjakan beberapa tenaga sebagai tukang dan designer. Tukang dalam bekerjanya menggunakan system borongan dengan memperoleh bayaran Rp. 50 ribu – Rp. 100 ribu sekali borongan, sedangkan designer dalam setiap bulannya memperoleh bayaran antara Rp. 500 ribu – Rp. 1 juta, bila dilihat bayaran sebagai tukang tidak begitu besar bahkan kurang dari standar garis kemiskinan untuk Daerah Yogyakarta yaitu Rp. 76.773/kapita/bulan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pekerja tukang sangat rentan terhadap kemiskinan bila tidak ada pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilannya.

Kelembagaan, Peran UPT sangat besar sekali bagi perkembangan kerajinan gerabah, terutama ditujukan dalam membina kelompok pengrajin gerabah dalam meningkatkan mutu dan kualitas dari kerajinan gerabah, disamping kelembagaan ekonomi, juga kelembagaan social berkembang pula di desa tersebut. Lembaga Masyarakat Desa atau yang sekarang berganti nama menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) perannya belum terlihat.

Analisis Data

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai ciri ,karakteristik , potensi dari keragaman sumber daya dari masing – masing desa , maka terdapat perbedaan potensi dan ciri dari masing – masing desa contoh. Namun ada ciri yang khas dari masing – masing desa tersebut adalah komoditas yang dihasilkan.

Dari kriteria tersebut , dapat diidentifikasi beberapa ciri dari masing – masing tipologi desa , yakni tingkat kemiskinan , struktur mata pencarian , sarana dan prasarana , sumber daya manusia , kepemilikan asset lahan , dan kelembagaan.

Tingkat Kemiskinan. Rata – rata tingkat kemiskinan pada keluarga petani pada masing – masing desa relative tinggi kecuali Desa Kertawangi dengan spesifikasi desa peternakan sapi perah dan Desa Bangunjiwo dengan spesifikasi desa jasa dan perdagangan. Pada Desa Kertawangi kondisi ini dimungkinkan karena bila dihitung nilai ekonomis dari ternak sapi perah , satu ekor ternak siap perah dapat dijual seharga 8 juta per ekor. Disamping itu , produksi susu yang dihasilkan mampu memberikan nilai tambah pendapatan bagi keluarga petani. Namun kondisi ini sangat rentan dengan iklim dan lahan karena peternakan sapi perah sangat berhubungan erat dengan kedua faktor tersebut. Pada Desa Bangunjiwo , yang merupakan desa dengan penghasilan keramik dan gerabah yang hasilnya dipasarkan ke pasar domestic maupun ke pasar ekspor dengan tujuan negara ekspor antara lain : Amerika , Australia , Belgia , Belanda , Jepang , Perancis , Saudi Arabia , Selandia Baru , dan Singapura. Dengan telah merambahnya pemasaran keramik dan gerabah tersebut , pendapatan dari para pengrajin , pengusaha maupun pekerja akan semakin baik dan meningkat.

Struktur Mata pencarian. Mata pencarian utama dari masing – masing desa tersebut disesuaikan dengan komoditas yang diusahakan kebanyakan masyarakat desa. Biasanya mata pencarian ini telah menjadi turun temurun sebagai sumber penghidupan petani. Namun adakalanya mata pencarian tersebut hanya sebagai mata pencarian alternative bila sumber daya sudah tidak memberikan nilai tambah bagi petani , seperti pada Desa Sukasirna. Walaupun mereka menggarap lahan milik ataupun sewa , karena penghasilan dari lading atau sawah hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup sehari – hari saja. Di samping itu , hampir seluruh desa contoh penduduknya mempunyai mata pencarian alternative sebagai penunjang kehidupan mereka , akan tetapi kondisi ini tidak dijumpai pada Desa Gempolsewu dengan spesifikasi desa nelayan , dan desa Bangunjiwo dengan spesifikasi desa jasa dan perdagangan. Pada Desa Gempolsewu ketiadaan mata pencarian alternative lebih banyak disebabkan karena ketiadaan kemampuan dan keterampilan untuk berusaha selain untuk menangkap ikan , dan pada Desa Bangunjiwo , penduduk dengan mata pencarian sebagai pengrajin gerabah tidak mempunyai alternative mata pencarian karena bekerja sebagai pengrajin gerabah dan keramik lebih banyak menyita waktu , sehingga tidak ada kesempatan untuk berusaha di sector yang lain , juga mereka merasa telah cukup penghasilannya dari usaha kerajinan keramik dan gerabah tersebut.

Kepemilikan Aset Lahan. Kepemilikan lahan rata – rata untuk desa – desa yang ada di Pulau Jawa kurang dari 0,5 Ha. Hal ini disebabkan lahan – lahan di Pulau Jawa mulai mengalami perubahan fungsi lahan , yaitu dari lahan pertanian menjadi perumahan , industri atau yang lainnya. Hal tersebut bisa disebabkan tingkat produksi dari lahan semakin berkurang dan tentunya pendapatan petanipun akan menurun juga dari hasil

pengelolaan lahan. Berbeda dengan dari luar Pulau Jawa contohnya Desa Sipatuo , kepemilikan lahan dari petani rata – rata di atas 0,5 Ha. Hal ini sangat wajar karena daerah – daerah di Pulau Jawa lahannya relative masih luas dan perubahan fungsi lahan masih belum terlalu tinggi sehingga mereka mereka dapat memaksimalkan lahannya untuk produksi komoditas yang mereka hasilkan.

Sumberdaya Manusia. Sebagian besar penduduk dari desa contoh memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan ini akan berpengaruh pada rendahnya kecepatan penyerapan adopsi teknologi , kemampuan untuk menggali informasi dan rendahnya daya kreatifitas dan inovasi. Kondisi ini bisa mempengaruhi perkembangan pertanian maupun perikanan khususnya pada proses perubahan dari system tradisional ke system yang lebih modern.

Sarana dan Prasarana. Rata – rata infrastruktur jalan desa di desa contoh relative baik dan dapat dilalui oleh kendaraan umum , seperti angkutan pedesaan , ojek. Demikian juga dengan alat transportasi dan komunikasi telah dapat diakses oleh desa – desa contoh , seperti telepon , wartel dan kantor pos. namun infrastruktur ekonomi , seperti pasar dan perbankan tidak dipunyai oleh seluruh desa contoh.

Kesimpulan dan rekomendasi

Dari hasil pengkajian pembangunan desa – desa untuk mengatasi kemiskinan yang menampilkan enam tipologi desa (pesawahan , perkebunan , peternakan , ladang , perikanan dan jasa , serta perdagangan) dan keberagaman daerah kajian yaitu Pulau Jawa (Jawa Barat , Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta) dan luar Jawa (Sulawesi Selatan) ada beberapa hal yang dapat menjadikan suatu kesimpulan sementara anantara lain:

1. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di desa contoh, sedikit banyak terkait dan dipengaruhi oleh jenis tipologi desan dimana desa tersebut mempunyai sumber matapencarian tertentu, seperti pada desa nelayan dengan hasil ikan yang cepat membusuk dan harus cepat dijual, sengan rentan terhadap kemiskinan dengan tingkat kemiskinan tinggi, demikian juga desa dengan perladangan. Tingkat kemiskinan tersebut juga dipengaruhi oleh ada atau tidaknya matapencarian alternative, dengan adanya sumber matapencarian alternative pengahsilan jika penghasilan utamanya mengalami penyusutan.
2. Paling tidak pada desa-desa percontohan, sarana prasarana terpenuhi dan memadai seperti jalan, pasar, maupun sarana yang lain, akan tetapi “ kelengkapan“ sarana dan prasarana tersebut belum cukup untuk dapat menggerakkan keberagaman kegiatan perekonomian masyarakat desa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Disamping itu, dibalik terpenuhinya fasilitas tersebut masih belum mampu untuk menjadi suatu stimulus untuk menggerakkan perekonomian masyarakat, yang selanjutnya dapat menjadi usaha untuk dapat menanggulangi kemiskinan yang selam ini dialami oleh wilayah pedesaan
4. Penguasaan lahan untuk desa-desa yang berlokasi di pulau Jawa umumnya kurang dari 0,5 Ha dan di desa di luar Jawa lebih dari 0,5 Ha , hal ini terkait dengan masih luasnya tanah yang ada di luar pulau jawa. Kepemilikan lahan ini paling tidak

mempunyai peran untuk mengusahakan penduduk sebagai sarana untuk mencari alternative sumber matapencarian utamanya :

Maka perlu adanya suatu rekomendasi dalam upaya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pembangunan ekonomi pedesaan dimasa mendatang yang lebih menitikberatkan pada :

1. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, peningkatan ini menjadi sesuatu yang penting karena dengan meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia yaitu peningkatan jenjang pendidikan penduduk akan berpengaruh pada kecepatan penyerapan adopsi teknologi, kemampuan untuk menggali informasi dan daya kreatifitas dan inovasi. Dengan peningkatan kemampuan tersebut akan lebih meningkatkan pendapatan masyarakat, yang ada pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraannya dan dapat mengentaskan dari garis kemiskinan.
2. Adanya penciptaan dan pengembangan lembaga ekonomi yang sudah ada, lembaga ekonomi ini seperti keberadaan koperasi, unit pelaksana teknis (UPT), tempat pelelangan ikan (TPI), dimana akan lebih banyak membantu masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan pendapatannya.
3. Mengevaluasi peraturan-peraturan yang selama ini terkait dan berhubungan dengan masyarakat pedesaan, agar lebih berpihak pada masyarakat kecil, dengan demikian campur tangan pemerintah paling tidak dibutuhkan untuk memberi kepastian hukum dan melindungi masyarakat kecil jika akan berhadapan dengan golongan masyarakat yang mempunyai modal dan kekuasaan yang lebih besar.
4. Pemerintah supaya lebih aktif mendorong dan mencari alternative matapencarian pada masyarakat pedesaan terutama pada masyarakat yang hidup pada desa dengan tipologi desa nelayan, desa jasa dan desa perdagangan. Peran aktif pemerintah tersebut terutama ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui suatu pelatihan atau kursus maupun pendidikan keterampilan, seperti pelatihan pengolahan hasil perikanan, bagi desa nelayan maupun pelatihan untuk berkreasi seni lebih tinggi terhadap hasil keramik dan gerabah pada masyarakat di desa dan perdagangan.